

MAKALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA

KUMPULAN MAKALAH

Thank you for reading **MAKALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA KUMPULAN MAKALAH**. Maybe you have knowledge that, people have look hundreds times for their chosen novels like this **MAKALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA KUMPULAN MAKALAH**, but end up in malicious downloads. Rather than enjoying a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled with some infectious bugs inside their desktop computer.

MAKALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA KUMPULAN MAKALAH is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly.

Our book servers spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.

Merely said, the **MAKALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA KUMPULAN MAKALAH** is universally compatible with any devices to read

Anotasi Pemikiran Hukum - Muhammad Naufal Arifiyanto 2016-01-13
Buku ini merupakan tulisan dari sejumlah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2013 yang telah mengikuti perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Catatan politik - Denny J.A. 2006

Pemilu dan Partai Politik di Indonesia - Muhtar Haboddin 2016-11-01

Bangsa Indonesia layak mendapat predikat sebagai bangsa "sejuta pemilu." Dikatakan demikian, karena peristiwa pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa terus berlangsung tanpa henti. Implikasi dari banyaknya proses pemilihan membuat masyarakat semakin terbiasa dan semakin cerdas dalam menentukan pilihannya pada proses politik pemilu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin "melek" terhadap proses penyelenggaraan

pemilu.

Filsafat Hukum - Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2023-01-25
Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, apakah sebanya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas bagi filsafat hukum untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, sehingga substansi dari hukum itu benar-benar ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Filsafat hukum juga mencakup penjelasan nilai-nilai misalnya penyelerasian antara ketertiban dan ketentraman, antara keadaan dengan keahklakan, serta antara kelanggengan dengan pembaruan. Buku yang berada di hadapan pembaca ini adalah hasil karya seorang yang sudah ahli dalam bidangnya yang menguraikan filsafat hukum secara

detail, padat, mendalam, dan berwawasan keilmuan yang tinggi. Oleh karena itu, materi buku ini dapat dijadikan landasan awal untuk menyelami pelaksanaan suatu hukum dalam masyarakat.

Pembangunan pertanian - Bustanul Arifin 2005

A model of policies and strategies to revitalize the Indonesian agricultural sector.

KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia 2019-10-22

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemikiran di bidang hukum dari para pakar dan praktisi hukum mengenai berbagai topik hukum yang pernah dibawakan pada seminar nasional dalam rangka hari ulang tahun IKAHI yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari pada hakim 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. IKAHI sebagai perkumpulan hakim Indonesia senantiasa berupaya mengawal dan mendukung tegaknya negara hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sejarah peradilan di Indonesia tidak bias dilepaskan dari peran serta IKAHI sebagai perkumpulan hakim untuk memperjuangkan kemandirian dan reformasi kekuasaan kehakiman. Sadar akan peran strategis, harkat dan martabat, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum dan keadilan, maka Hakim Indonesia bertekad mengembangkan profesionalisme dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam pembangunan hukum nasional termasuk diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berupa seminar nasional yang diselenggarakan pada setiap hari ulang tahun IKAHI. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan profesionalisme hakim, maka Pengurus Pusat IKAHI mengumpulkan tulisan-tulisan pemikiran di bidang hukum dari pakar dan praktisi hukum

mengenai berbagai topik yang disampaikan pada seminar nasional tersebut secara digital agar lebih mudah diakses lebih meluas oleh para hakim Indonesia guna menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum.

Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual - 1993

Indonesian muslim women; papers of a seminar.

Pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia - 2003

On civic, human rights, and the state in Indonesia; collection of articles.

Dinamika Sengketa Pemilukada Di Indonesia - Rudy, SH., LL.M., LL.D 2014-06-01

"buku ini sangat bagus untuk dibaca dan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami karakteristik pelanggaran/sengketa Pemilukada, sehingga bisa bersama-sama mengawal dan mencatatkan diri dalam sejarah tegaknya tonggak demokrasi yang dicita-citakan bangsa indonesia" Fatikhatul Khoiriyah Ketua Bawaslu Lampung Berakhirnya dekade pertama Mahkamah Konstitusi dan melangkah pada dekade kedua harus selalu diiringi dengan kritik dan saran untuk membangun citra institusi tersebut. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu dianggap sakral tidaklah lepas dari kekurangan. Begitu pun dalam hal kewenangannya terhadap putusan sengketa pemilihan umum kepada daerah. *Dinamika Sengketa Pemilukada* merupakan karya yang otentik dan menarik, mengingat buku ini menjelaskan kepada kita secara fundamental kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pemilihan umum kepada daerah. Melalui karya ini pun kita dapat melihat konsistensi MK dalam keputusannya. Tidak diragukan lagi karya ini karena ditulis oleh seorang yang mengkhhususkan terhadap perkembangan MK sejak pendirian samai detik ini. Rudy Natamihardja Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Aix

Marseille II, Perancis
**Penyempurnaan Sistem Bikameral
Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR**
- Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si.
2020-01-21

Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi". Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dan ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah

contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-sama memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.

Accessions List, Southeast Asia -
Library of Congress. Library of
Congress Office, Jakarta 1988

Masyarakat - 1996

The ITB-York University Forum on Gender and Development, December, 1990 - Bonnie Lee Kettel 1992

Kajian - 1999-07

POLITIK KEBANGSAAN - JOKO SISWANTO
2020-03-10

Buku yang berjudul Politik Kebangsaan ini merupakan kumpulan pemikiran berbentuk makalah untuk kepentingan seminar dan materi ceramah yang topiknya mengedepankan mengenai politik dan kebangsaan khususnya di Indonesia. Permintaan sebagai nara sumber dalam seminar dan ceramah tersebut atas permintaan masyarakat baik LSM, ormas, orpol, lembaga pemerintah dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Pemilu dan partai politik di Indonesia - Abdul Bari Azed 2006

General election and political parties in Indonesia.

Indeks makalah konferensi, lokakarya, seminar dan sejenisnya di Indonesia - 1994

Pemilu dan perilaku memilih, 1955-2004 - Muhammad Asfar 2006

Catatan Politik - Denny JA 2006-08-01
Politik Indonesia periode 1995-1999 adalah periode yang dinamis. Sejak 1995 sudah dapat dirasakan bahwa Orde Baru sudah hamil tua dan akan lahir anak zaman yang baru. Yang tidak diduga, ternyata proses kelahiran itu terjadi secara sungsang. Sang anak lahir dengan sedikit cacat, sedangkan sang ibu berada dalam proses koma, antara hidup dan mati. Bagi seorang penulis dan aktivis, periode itu adalah lahan menakjubkan untuk diamati, dikomentari dan dianalisa. Dalam periode itu kebetulan saya berada di Amerika Serikat, melanjutkan sekolah di bidang comparative politics di Ohio State

University. Ketika terjadi perubahan besar yang berujung pada jatuhnya Soeharto, saya masih disana. Namun, secara rutin saya menulis, terutama untuk Koran Kompas dan Majalah Gatra. Saya pun tetap menulis makalah untuk kuliah. Buku ini adalah kumpulan sebagian dari tulisan periode itu.

Majalah konstitusi - 2010

Hukum Perselisihan Partai Politik - Dr.H.M. Anwar Rachma, SH MH
2016-10-31

Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susah. -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (2008-2014) Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik pertama di Indonesia. Sangat bagus dan bermanfaat bagi insan hukum, masyarakat, dan terutama praktisi. Buku ini layak untuk dibaca. -- Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia - Bambang Santoso
2022-12-01

Buku ini menjelaskan tentang berbagai persoalan penegakan hukum khususnya penganggaran HAM berat di Indonesia, serta bagaimana peran Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut. Untuk mengungkap hal tersebut, buku ini memberikan landasan berbagai teori tentang konsep negara hukum, penegakkan hukum dan teori tentang Hak Asasi Manusia. Secara singkat, buku ini menunjukkan bahwa

Implementasi kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum belum menunjukkan usaha dan hasil yang signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena sarat nuansa politis. Jaksa Agung menunjukkan sikap tidak mau (unwilling) dan terus menolak hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan tidak cukup bukti dan menunggu pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc, sikap unwilling Jaksa Agung menunjukkan pertentangan terhadap prinsip perlindungan HAM sebagai ciri utama negara hukum Rechtsstaat dan The Rule of Law yang dianut oleh Indonesia.

Politik Indonesia, 1996-2003 -

Hartono Mardjono 1996

Politics and Islam in Indonesia.

UN bahasa indonesia smp/mt - Priyono Mangunrejo

Majalah Konsitusi Nopember 2009 - MK MEDIA 2009-11-01

Menginjak November 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai berbagai kejadian penting, bahkan kontroversial sehingga menyedot perhatian khalayak ramai. Peristiwa yang paling mencengangkan adalah dibukanya rekaman perbincangan dengan sejumlah aparat penegak hukum terkait kasus Bibit-Chandra, yang terkenal dengan istilah 'cicak vs buaya'. Persidangan yang terjadi pada Senin (2/11) itu dibuka langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD setelah mendapat kesepakatan dari para hakim konstitusi lainnya.

Pembangunan politik, situasi global, dan hak asasi di Indonesia - Haris Munandar 1994

Festschrift in honor of Miriam Budiardjo, b. 1923, an Indonesian scholar in political science.

Masalah tindak pidana dan upaya penegakan hukum - Bambang Waluyo 2006
Enforcement of laws on various criminal cases in Indonesia; collected articles.

Mendengar Opini Publik - Denny JA 2019-07-01

Jika ada karya yang bisa merekam opini publik sepanjang musim pemilu 2019 secara komprehensif, maka buku inilah salah satunya. Rekaman opini publik ini diperoleh dari data survei nasional yang dilakukan oleh LSI Denny JA setiap satu bulan, sepanjang bulan Agustus 2018-Mei 2019. Dari data survei tersebut, dibuatlah makalah yang disampaikan melalui konferensi pers per dua minggunya. Terkumpul serial 10 kali survei nasional dan lebih dari 20 makalah konferensi pers. Ini sebuah kekayaan data luar biasa. Dari beragam data dan judul yang diangkat dalam makalah ini kita bisa membaca kembali aneka temuan penting. Diantaranya: Program populis Jokowi yang membuat Jokowi unggul telak pada pemilih wong cilik, Reuni 212 yang ternyata tak banyak pengaruh, pergeseran dari pertarungan calon presiden (capres) pada enam kantong suara dan media sosial. Adanya efek elektoral dari tingkat kepuasan ekonomi dan pengaruh ulama. Dan tak kalah menariknya data tentang hoax dan golput (golongan putih). Tak hanya soal calon presiden, dalam makalah ini juga banyak membahas temuan penting soal partai politik, misalnya pengaruh caleg (calon legislatif) dalam efek elektoral partai dan lainnya. Untuk melengkapi data survei, buku ini juga menyajikan hasil quick count dan tiga pesan real count KPU (Komisi Pemilihan Umum) pemilu 2019 yang penting untuk diketahui publik dan para pengambil kebijakan.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA - Fauzan Khairazi

2022-03-01

Buku ini disusun dalam rangka mengetahui Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip demokrasi, tentunya berusaha menjunjung tinggi dan

senantiasa menjalankan prinsip dan azas yang dipersyaratkan untuk memastikan keadilan pemilu (electoral justice). Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu Lembaga yang mempunyai peranan untuk penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Pada buku ini digambarkan bagaimana penyelesaian sengketa hasil yang dilakukan dalam pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota di Indonesia, bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa Proses pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan bagaimana Eksistensi Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Sistem Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.

Kumpulan makalah - Universitas Muhammadiyah Jakarta 1991
Collection of research reports on various topics by teaching staff of the Muhammadiyah University, Jakarta.

Kumpulan makalah Diskusi Sejarah Lokal: Konflik komunal dan ketersingkiran sosial - 2001

On local history dealing with social conflicts and related topics in Indonesia; seminar papers.

The Golkar way - Akbar Tanjung 2007
Role of Golkar, a political party in Indonesia, on political transition era.

Pemilu langsung di tengah oligarki partai - Syamsuddin Haris 2005

Dinamika Konsolidasi Demokrasi - Valina Singka Subekti 2015

Buku ini mendeskripsikan dinamika dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada era reformasi dengan rentang isu cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi, perdebatan format baru pemilu di era transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, dan demokrasi, problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga isu problematika sistem demokrasi pada umumnya.

Demokrasi di Indonesia - Miriam Budiardjo 1994

Democracy in Indonesia; collected papers.

Konflik politik dalam perspektif kebangsaan - H. Bambang Pranoto 2001
Political conflicts in Indonesia; collection of articles previously published.

Sosiologi Hukum - Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2023-02-01

Sosiologi hukum adalah Suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat secara empiris analisis. Dengan mempelajari sosiologi hukum dapat dianalisis sebanyak mungkin kondisi aktual dalam masyarakat sehingga hukum berlaku secara efektif. Buku ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum yang dituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 bab. Selain itu, pembahasan disertai dengan, fakta-fakta historis terkait kepatuhan hukum dalam masyarakat dan contoh kasus penerapan aturan hukum. Hal ini dituangkan secara luas dan padu untuk memberi gambaran sejauh mana sosiologi hukum memainkan peran dalam mengubah sikap masyarakat untuk menjunjung tinggi aturan hukum positif di tanah air. Buku ini patut dijadikan referensi yang utama bagi mahasiswa hukum, baik pada jenjang strata 1, maupun strata 2, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan para pembuat kebijakan di tanah air.

Keterwakilan perempuan dan sistem pemilihan umum - Indonesia. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2002
Women's participation in the general election system and how to increase women's participation in politics.

Hukum Pemerintahan Daerah - Prof. Dr. Juanda. S.H., M.H. 2021-11-29
Dengan adanya Upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum

pemerintah daerah semakin luas kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah. Secara historis hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut mengalami pasang surut dalam periode tertentu. DPD lebih dominan dalam periode lain kepala daerah lebih dominan. Pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Berpedoman pada kelemahan dari pola-pola yang lalu di masa datang harus dibangun suatu konsep atau prinsip seimbang setara sederajat dan kemitraan atas semangat *check and balance* yang peraturannya dirumuskan secara tegas di UUD 1945 dan dijabarkan di dalam UU tentang pemerintahan daerah. Manfaat buku ini bagi mereka yang haus akan ilmu antara lain meningkatkan wawasan intelektualitas dan Wibawa dalam memahami dinamika kehidupan politik dan hukum yang kadang dipikirkan sangat tidak ideal.

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan RI - Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum. 2006-07-17
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari

segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai "lembaga negara", juga sebagai "lembaga UUD 1945". Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai "Lembaga UUD 1945", artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.